KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ratusan anggota dewan mangkir sidang paripurna
Tanggal : Rabu, 21 Januari 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ratusan Anggota Dewan Mangkir Sidang Paripurna

RAPAT Paripurna DPR yang mengagendakan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah, dan Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sempat molor 45 menit dari jadwal pukul 10.00 WIB.

Pembukaan sidang ngaret demi menanti kehadiran anggota DPR agar quorum. Pantauan *Rakyat Merdeka* pada sekitar pukul 10.15 WIB, dari total 555 anggota DPR, yang menandatangi lembaran absensi di pintu masuk ruang sidang paripurna baru 197 anggota.

Namun, sejumlah anggota DPR masih terlihat berdatangan mengisi absensi manual yang disediakan Sekretariat Jenderal DPR di pintu masuk. Sekitar pukul 10.45, kehadiran anggota DPR lebih dari separuh. Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR, membuka membuka sidang.

Tampak hadir dua menteri mewakili Pemerintah, yaitu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Saya bacakan daftar kehadiran sidang paripurna kali ini, yang saya terima dari Sekretariat Jenderal DPR. Pada rapat ini hadir sebanyak 307 anggota DPR dari total 555 anggota," kata Agus saat membuka rapat paripurna di Gedung DPR, kemarin.

Jumlah total anggota DPR periode 2014-2019 seharusnya 560 orang dari 10 fraksi partai politik. Namun, 5 anggota DPR terpilih tidak bisa dilantik pada 1 Oktober 2014 karena tersangkut kasus hukum. Sehingga total anggota DPR sekarang yaitu 555 orang.

Berdasarkan daftar kehadiran anggota DPR per fraksi yang tercatat oleh Sekretariat Jenderal DPR pada sidang paripurna kemarin; Fraksi PDIP hadir 53 anggota dari 106 anggota, Fraksi Golkar hadir 55 anggota dari 90 anggota, Fraksi Gerindra 48 anggota dari 73 anggota, Fraksi Demokrat hadir 41 anggota dari 60 anggota, Fraksi PAN hadir 19 anggota dari 48 anggota, Fraksi PKB hadir 20 anggota dari 47 anggota, Fraksi PKS hadir 19 anggota dari 40 anggota, Fraksi PPP hadir 20 anggota dari 39 anggota, Fraksi Nasdem hadir 20 anggota dari 36 anggota, dan Fraksi Hanura hadir 12 anggota dari 16 anggota fraksi.

Seperti sudah diprediksi, seluruh fraksi setuju menerima Perppu Pilkada dan Perppu Pemda yang diteken Presiden Susislo Bambang Yudhoyono menjadi undang undang dengan sejumlah perbaikan. Keputusan ini diambil secara bulat tanpa ada gejolak. ■ QAR